MENDORONG PERAN PEMERINTAH DALAM MENEKAN ANGKA KEMISKINAN DI MASYARAKAT

Tahun 2023 merupakan tahun pemulihan ekonomi. Inflasi yang terjadi di berbagai belahan dunia melahirkan dampak bagi masyarakat. Inflasi mendorong terjadinya jurang (gap) antara pencari kerja dan lapangan pekerjaan, yang berimbas pada timbulnya pengangguran di Indonesia (Kelvin et al., 2022). Inflasi juga menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Ketika nilai mata uang turun, menyebabkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kondisi yang sebelumnya. Inflasi juga menyebabkan meningkatnya harga barang dan kebutuhan. Penghasilan yang dimiliki masyarakat dengan pendapatan rendah akan cenderung digunakan pada kebutuhan pokok. Hal ini akan berpotensi pada meningkatnya angka kemiskinan di masyarakat.

Berdasarkan data yang dipublikasikan melalui Berita Resmi Statistik pada 17 Juli 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada September 2021 jumlahnya 26,5 juta jiwa dan jumlahnya berkurang pada Maret 2022 menjadi 26,16 juta jiwa. Akan tetapi pada September 2022 jumlahnya kembali meningkat menjadi 26,36 juta jiwa. Pada Maret 2023 jumlahnya kembali berkurang hingga mencapai 25,90 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk miskin ditengarai karena adanya faktor pendidikan masyarakat yang rendah, inisiatif untuk bekerja, keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan lapangan kerja, keterbatasan modal untuk berwirausaha, meningkatnya beban keluarga (Itang, 2015).

Pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam upaya menekan angka kemiskinan di Indonesia. Pengurangan kemiskinan memerlukan langkah-langkah konkrit dan kebijakan khusus yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan melalui program-program pengentasan kemiskinan (Nilawati, 2016). Pemerintah dapat mengejawantahkan hal tersebut dengan mendorong perbaikan pada faktor yang mempengaruhi kemiskinan, diantaranya: Pertama; meningkatkan pendidikan masyarakat. Peningkatan pendidikan di Indonesia tidak hanya difokuskan pada metode dan kurikulum pembelajaran saja. Untuk meningkatkan mutu pendidikan juga dapat dilakukan dengan perbaikan sarana dan prasarana yang merata di penjuru nusantara (Safitri et al., 2022). Program beasiswa pendidikan yang sudah berjalan saat ini, sebaiknya dijadikan sebagai agenda jangka panjang yang berkelanjutan. Program pendidikan yang diterapkan pada periode mendatang, sejatinya dapat sejalan dengan program-program *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Kedua, pemerintah harus mampu menjadi pionir dalam meningkatkan inisiatif masyarakat untuk bekerja. Program-program pelatihan keterampilan bekerja telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Keberadaan pelatihan ini juga diharapkan mampu berfokus pada keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Karena keterampilan kerja akan mendorong produktivitas kerja (Syahdan, 2017). Beragamnya jenis pelatihan yang diselenggarakan pemerintah akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan. Sehingga akan mendorong inisiatif masyarakat untuk bekerja.

Ketiga, keterbatasan sumber daya alam seringkali menjadi faktor penghambat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pemerintah dalam hal ini dapat mendukung gerakan pertanian di masyarakat. Dukungan tersebut dapat dilaksanakan melalui penguatan regulasi pertanian, pengembangan teknologi dan inovasi pertanian, penyuluhan pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang terjangkau. Di sisi

lain pemerintah juga diharapkan dapat bersinergi dengan *stakeholder* dalam mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi yang berkelanjutan.

Keempat, keterbatasan lapangan kerja menjadi tantangan pemerintah karena terdapat paradigma di masyarakat yang berpikir tentang lebih mudah mencari kerja daripada menciptakan lapangan pekerjaan (Margahana, 2020). Untuk menangani penggangguran terbuka di Indonesia, Mifrahi & Darmawan (2022) merekomendasikan perbaikan yang berfokus pada faktor-faktor mikroekonomi. Peran pemerintah dibutuhkan untuk mendorong investasi di daerah. Investasi tidak hanya didorong untuk sektor industri saja, tetapi dapat juga dikembangkan pada sektor pariwisata, jasa, pertanian, perkebunan, dan sektor lain yang sesuai dengan potensi daerah. Pemerintah juga diharapkan untuk menggalakan program padat karya untuk membuka peluang kerja pada masyarakat sekitar. Dalam hal merubah pola pikir masyarakat, pemerintah dapat melaksanakan program-program kewirausahaan. Tentunya pelaksanaan program kewirausahaan bagi masyarakat melibatkan perguruan tinggi, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.

Kelima, keterbatasan modal untuk berwirausaha menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat pelaku usaha (Farida, 2020), terutama paska Pandemi Covid-19. Pemerintah mempunyai peranan dalam menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan unit usaha di daerah akan menciptakan lapangan kerja. Sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Pemerintah dapat mengupayakan pendirian lembaga keuangan mikro yang akan memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat. Diharapkan keberadaan lembaga keuangan mikro ini dapat membantu masyarakat dengan bunga pinjaman yang terjangkau.

Keenam, meningkatnya beban pengeluaran yang disebabkan oleh penambahan jumlah anggota keluarga. Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dapat meningkatkan angka kemiskinan. Pemerintah dapat menyelenggarakan edukasi perencanaan keluarga. Keluarga Berencana merupakan salah satu program yang dilaksanakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Meski belum sepenuhnya Program Keluarga Berencana berhasil, dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat (Pradana, 2019). Kegiatan lain yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah adalah menyediakan bantuan sosial, perumahan yang layak huni, dan fasilitas umum untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan di daerah merupakan kerja pemerintah yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Dibutuhkan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih. Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui pelayanan publik. Penerapan pelayanan publik sejatinya harus sejalan dengan arah pembangunan yang berkelanjutan (SDGs). Sehingga pelaksanaan publik akan menjadi solusi dalam mengakhiri kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik yang diselenggarakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini saja. Pemerintah harus mampu memprediksi kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Pelayan publik harus terbiasa dengan adanya perubahan jaman. Sehingga pelayanan publik yang diselenggarakan tidak kaku dan monoton. Kemajuan jaman sangat mempengaruhi terhadap perubahan kultur pelayanan publik. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology*) dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) sangat membantu kerja para pelayan publik.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik lebih dikenal dengan *Electronic Government (E-Government)*. Penerapan pelayanan publik berbasis *E-Government* tentunya juga akan mendorong terciptanya layanan

yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat akan lebih partisipatif dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Kritik dan saran dari masyarakat akan menjadi pedoman pemerintah dalam melakukan perbaikan pelayanan publik. Perbaikan pelayanan publik akan berdampak pada perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sektor lainnya. Sehingga akan memberikan peluang yang lebih baik dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Henri Sinurat)

Referensi

- Badan Pusat Statistika. (2022). BRSbrsInd-20230116122008. *Profil Kemiskinan Indonesia September 2022*.
- Farida, N. L. (2020). Pengaruh Modal Usaha Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Unggulan Di Kota Kediri. *Ekonomi*, 1.
- Itang. (2015). Faktor faktor penyebab kemiskinan. *Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 16(1).
- Kelvin, K., Wiliyan, H., Melissa, M., Amanda, N., & Husna, S. F. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi. *Jurnal Mirai Management*, 7(2).
- Margahana, H. (2020). Urgensi Pendidikan Entrepreneurship Dalam Membentuk Karakter Entrepreneur Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(2). <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i2.4096>
- Mifrahi, M. N., & Darmawan, A. S. (2022). Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art11>
- Nilawati, E. (2016). Kinerja Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) DI Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v19i2.4>
- Pradana, R. B. A. (2019). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk. *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2). <https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1990>
- Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3296>
- Syahdan, F. (2017). Hubungan Antara Keterampilan Kerja Dengan Produktivitas Kerja. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5(1). <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v5i1.4334>